

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Negara Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks untuk di perbincangkan, hal tersebut merupakan suatu hal yang perlu di perdebatkan di sebuah forum internasional maupun nasional, walaupun kemiskinan merupakan hal yang sering muncul sejak ratusan bahkan ribuan yang lalu dan belum juga ter selesaikan sampai saat ini. Kita ketahui bahwa kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang sering berhubungan dengan berbagai hal mengenai keadaan hidup. Kondisi kemiskinan sendiri telah berkembang secara ekonomi didalam suatu negara dan menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan demikian apabila tingkat kemiskinan dimasyarakat menurun maka dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara itu meningkat (Wiguna, 2013).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan ini menjadi hal yang sulit untuk menghindari hal kemiskinan tersebut. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bisa saja berupa soal pengangguran dan ketimpangan social yang sangat mendasar di Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk miskin yang banyak berdomisili di pedesaan. Kemiskinan disini dapat diartikan

bahwa seseorang yang sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan yang ia peroleh (Amaliah, 2015).

Kelompok penduduk miskin yang berada di perkotaan atau pedesaan biasanya mereka berkerja menjadi buruh tani, pedagang kaki lima, pedagang kecil dan pengangguran. Karena kualitas sumber daya yang rendah dan mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan mencari pekerjaan susah. Pemerintah sudah bersusah payah untuk melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang berada di Indonesia ini (Saputra, 2011).

Ibnu Kathir secara detail menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ia pun diberi sesuatu yang sekiranya sedikit menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Ibnu Kathir mengutip hadis yang secara eksplisit menerangkan tentang term miskin.

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُ هِ الْفَمَّةِ وَالْفَمَتَانِ وَالْتَمْرَةَ
وَالْتَمْرَتَانِ

وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنَىٰ يَغْنَىٰ بِهِ وَلَا يَفُطِنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقَ

عَلَيْهِ

Yang artinya: Bukanlah miskin orang yang keliling meminta-minta kepada manusia lalu ia ditolak dengan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir dan dua butir kurma. Akan tetapi miskin adalah yang tidak mendapatkan kecukupan untuk mencukupinya dan tidak ada yang mengetahui kondisinya untuk memberi sedekah kepadanya.

Penggunaan makna faqr yang dapat diidentikkan dengan term miskin adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Banyumas
(Ribu Jiwa) Tahun 2012-2017

Wilayah Jateng	Kemiskinan					
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cilacap	260.9	255.7	239.8	243.5	240.2	238.3
Banyumas	303.9	296.8	283.5	285.9	283.9	283.2
Purbalingga	181.3	181.1	176	176.5	171.8	171.9
Banjarnegara	164	166.8	159.5	165.4	158.2	156.8

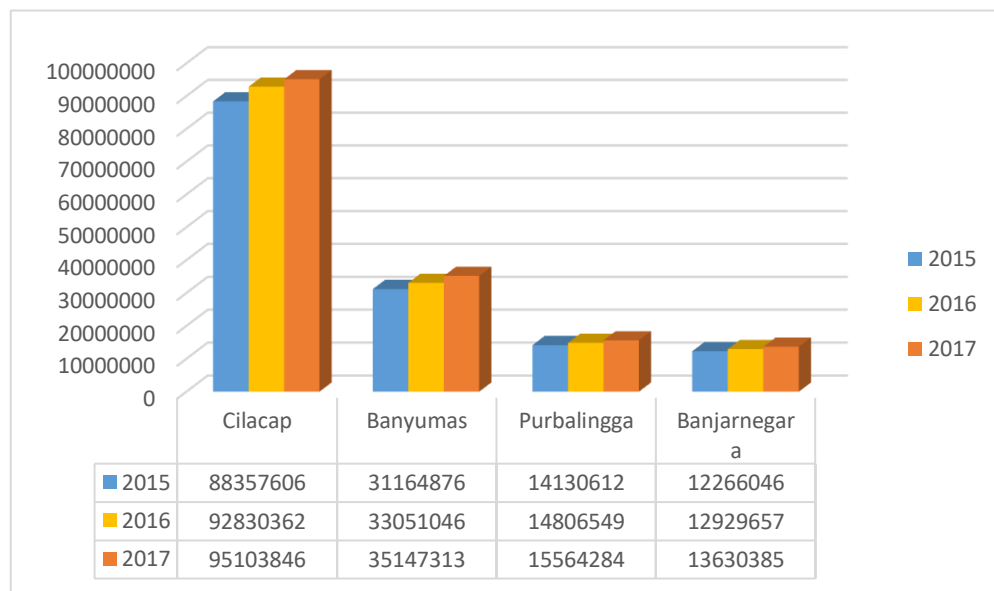
Sumber :Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwa tingkat kemiskinan yang dilihat dari jumlah penduduk miskin di Eks karesidenan

Banyumas terendah ditempati oleh Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017, yaitu sebesar 156.8 ribu jiwa, pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara ini mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 303.9 ribu jiwa, ditahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan sampai tahun 2014. Dan di tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah Banyumas.

Dalam memahami masalah-masalah pada kemiskinan yang ada di Indonesia ini, perlu perhatikan juga lokalitas di setiap masing-masing daerah, yaitu kemiskinan yang berada pada tingkat lokal yang sudah di tentukan oleh komunitas atau pemerintah setempat. Pembangunan struktur ekonomi yang ideal merupakan suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi agar semua keputusan yang diambil dapat berjalan tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam keputusan ini data statistic mempunyai perencanaan yang sangat penting untuk strategi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang ada, misalnya seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi daerah bekerjasama antara pemerintahan privat sektor dan masyarakat dalam mengelola

sumber daya yang ada. Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh penjuru dunia. Masalah kemiskinan sendiri tidak hanya melibatkan Negara-negara dunia ketiga maupun Negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2014).



Sumber: BPS Jateng, 2018

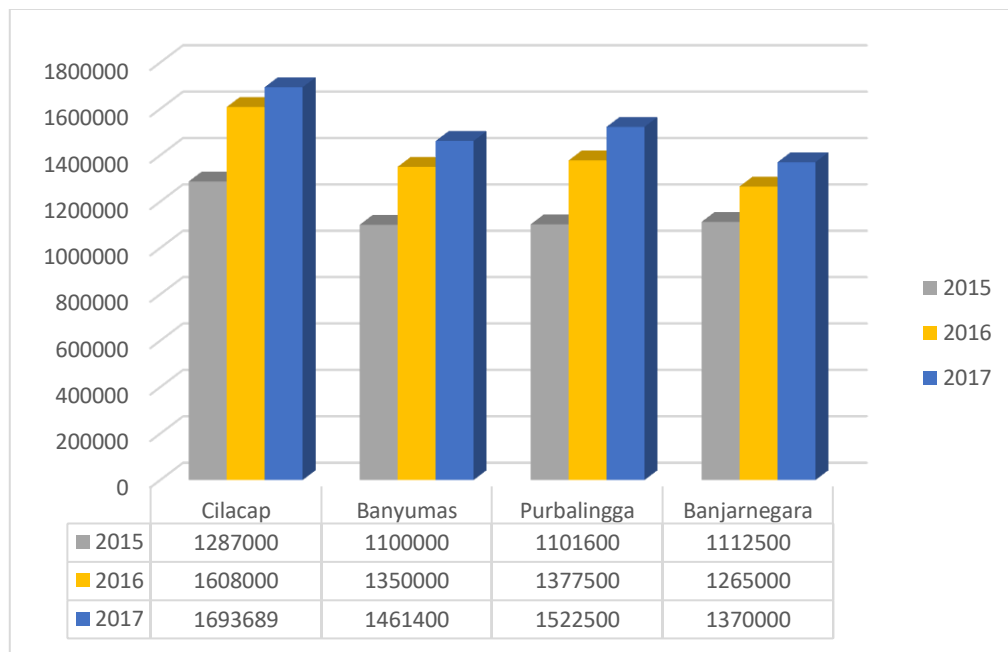
Gambar 1. 1
 Nilai PDRB Harga Konstan di Eks karesidenan Banyumas
 Tahun 2015 – 2017 (Juta)

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa nilai PDRB harga konstan tertinggi di Wilayah Eks karesidenan Banyumas berada di Kabupaten Cilacap pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah nilai PDRB sebesar Rp

95.103.846. Jumlah PDRB di Kabupaten Cilacap ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada grafik dari tahun 2015-2017 konstan mengalami peningkatan. Sedangkan nilai PDRB harga konstan terendah berada di Kota Banjarnegara pada tahun 2015 dengan jumlah PDRB sebesar Rp 12.266.046. Jumlah PDRB di Kota Banjarnegara ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada grafik dari tahun 2015-2017 konstan mengalami peningkatan. Sementara itu PDRB di 4 Kabupaten pada wilayah Eks Karesidenan Banyumas seluruhnya mengalami peningkatan yang stabil, itu menandakan bahwa PDRB di wilayah Eks Karesidenan Banyumas mengalami peningkatan dan menandakan semakin baiknya PDRB di wilayah tersebut.

Terdapat faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu Upah Minimum. Upah Minimum adalah standar yang digunakan untuk memberikan upah kepada karyawan, pegawai atau buruh dalam lingkungan kerja. Upah sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sasaran dari kebijakan upah minimum adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktifitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara produksi yang lebih efisien. Oleh karenanya diperlukan adanya penetapan upah minimum oleh pemerintah dengan disesuaikan oleh kondisi perekonomian yang ada didaerah

tersebut, maka upah minimum berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya (Prasetyo, 2010).



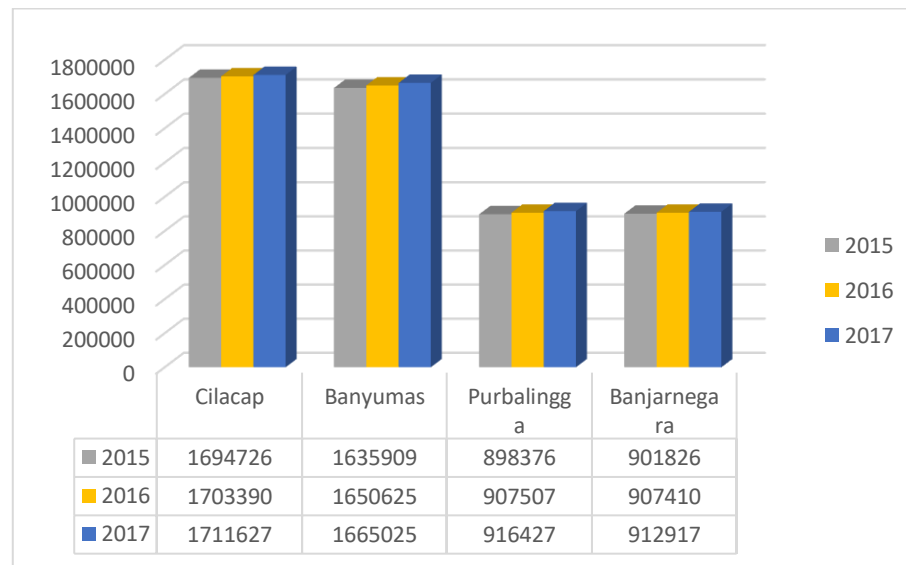
Sumber: BPS Jateng, 2018

Gambar 1. 2

Upah Minimum Kabupaten di Eks karesidenan Banyumas
Tahun 2015 – 2017 (Rupiah)

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa perkembangan upah minimum pada setiap kabupaten di Eks karesidenan Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan diiringi meningkatnya harga barang dan jasa. Upah minimum tertinggi pada tahun 2017 berada di Kabupaten Cilacap sebesar 1.693.689 rupiah, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banyumas sebesar 1.100.000 rupiah pada tahun 2015.

Dengan jumlah penduduk yang besar di Provinsi Jawa Tengah juga bisa menimbulkan permasalahan yang dimana dengan jumlah penduduk yang besar maka tingkat persaingan didunia kerja akan semakin ketat, apabila daya saing masyarakat Jawa Tengah rendah maka ini akan menjadi permasalahan sosial yang sangat berbahaya dan jika tidak di antisipasi oleh pemerintah daerah akan menimbulkan dampak yang kurang baik dimana pemupukan masyarakat akan menimbulkan gejolak ekonomi yang kurang baik kalau tidak diimbangi dengan kualitas hidup dan kesehatan yang layak (Ningtyas, 2017).



Sumber: BPS Jateng, 2018

Gambar 1. 3
Jumlah Penduduk di Eks karesidenan Banyumas
Tahun 2015 – 2017 (Jiwa)

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa jumlah penduduk di Eks karesidenan Banyumas terbanyak ditempati oleh

Kabupaten Cilacap pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 1.711.627 jiwa, jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 898.376 jiwa, Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Ketiga variabel di atas telah di gunakan dalam beberapa penelitian seperti halnya yang di teliti oleh Susanti (2013) yang menggunakan variabel PDRB yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel 2009-2011” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Dan juga variabel upah minimum yang dilakukan oleh Ningrum (2014) yang berjudul “Analisis pengaruh upah minimum, pengangguran, kesehatan dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi jawa tengah tahun 2008-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum, pengangguran, dan

pendidikan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan kesehatan berpengaruh positif. Secara bersama sama upah minimum, pengangguran, kesehatan dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2008-2012.

Dan variabel jumlah penduduk yang diteliti oleh Sholehah (2016) yang berjudul “analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta (Studi kasus Kabupaten/Kota Adm di Provinsi DKI Jakarta Periode 2008-2014)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di DKI Jakarta.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Banyumas Periode 2010-2017)”.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi, yaitu membahas mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitian dan instrument

penelitian antara lain Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah minimum dan Jumlah penduduk dalam penelitian ini yang digunakan adalah data di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, dalam penelitian ini akan ada beberapa konteks pembahasan guna memfokuskan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010-2017 ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010 – 2017

2. Menganalisis bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010 – 2017
3. Menganalisis bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas Tahun 2010 - 2017

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai media untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah.
 - b. Bagi akademisi, penelitian ini akan menambah wawasan untuk para akademisi dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Banyumas dan dapat memberikan tambahan referensi dan acuan bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Manfaat Praktik
 - a. Bagi masyarakat/pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
 - b. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pengambil kebijakan dalam

memahami masalah, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

